

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEGAL**



TUGAS AKHIR

OLEH:

DINA ARUM AMBAR WATI

NIM 20030016

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

2023 HALAM

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL

Oleh mahasiswa :

Nama : Dina Arum Ambar Wati

NIM : 20030016

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 6 Juni 2023

Pembimbing I,



Ririh Sri Harjanti, S.E., MM
NIPY. 04.015.215

Pembimbing II,



Fitri Amaliyah, S.E, M.Ak, Ak
NIPY. 10.005.014

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul:

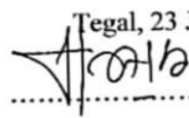
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL

Oleh :

Nama : Dina Arum Ambar Wati
NIM : 20030016
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

1. Hetika, S.Pd, M.Si, Ak
Ketua Penguji
2. Anita Karunia, SE, M.Si
Anggota Penguji 1
3. Fitri Amaliyah, S.E, M.Ak, Ak
Anggota Penguji 2

Tegal, 23 Juni 2023

.....

.....

.....

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Yetti Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA
NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR (TA)

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN TEGAL”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 23 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



DINA ARUM AMBAR WATI

NIM. 20030016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Dina Arum Ambar Wati

NIM : 20030016

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL.

Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tidak perlu meminta izin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 23 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



DINA ARUM AMBAR WATI

NIM. 20030016

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini ku persembahkan untuk:

1. Allah SWT karena hanya atas izin dan anugrahnya maka Tugas Akhir ini dapat dibuat dan selesai tepat waktu.
2. Kedua Orang Tua yang senantiasa mendoakan dan mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
3. Dosen pembimbing saya yang selalu mengarahkan dan memberi semangat sehingga tugas akhir dapat berjalan dengan lancar.
4. Semua teman-teman yang sudah bersedia mendoakan dan selalu mendengarkan curahan hati saya selama proses pembuatan Tugas Akhir ini.
5. Saya berterima kasih kepada beberapa musisi yang lagunya saya dengarkan dan jadi sumber penyemangat saat berjuang mengerjakan Tugas Akhir ini.
6. Almameterku yang selalu menjadi kebanggaan kita semua para mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.

Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan untuk kalian dan saya persembahkan tugas akhir ini untuk kalian, orang-orang yang saya sayangi begitupun sebaliknya.

HALAMAN MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah 286)

“Jika ada yang menghina anda, anggap saja sebagai pujian. Bahwa sebenarnya dia berjam-jam memikirkan anda, sedangkan anda tidak sedikitpun memikirkan dia”

(Alm. BJ. Habibie)

“Ijazah itu tanda orang pernah BERSEKOLAH, bukan tanda orang pernah
BERPIKIR”

(Bung Rocky Gerung)

“Sekolah yang bagus, yang pintar karena ya walaupun bukan satu-satunya kunci
kamu bakal sukses, tapi setidaknya itu bisa membuka satu pintu kesuksesan”

(Prilly Latuconsina)

“Ketika seseorang menyakiti kamu, lagi dan lagi. Anggaplah ia sebagai amplas yang
menggosok anda, pada akhirnya anda akan mengkilap dan dia habis tidak berguna”

(Deddy Corburzier)

“Tidak ada gunanya anda IQ nya tinggi tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. *Forget it*
yang penting adalah anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah
dan anda konsisten bekerja keras”

(Alm. BJ. Habibie)

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “ Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Agung Hendarto, SE., MA. selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
2. Ibu Dr Yeni Priatna Sari, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Prodi Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.
3. Ibu Ririh Sri Harjanti, S.E., M.M sebagai Dosen Pembimbing I yang senantiasa membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Fitri Amaliyah, S.E, M.Ak, Ak Dosen Pembimbing II yang sudah sangat sabar membimbing serta memberikan arahan dengan baik dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Seluruh karyawan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang telah membantu memberikan beberapa data dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas

segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Tegal, 23 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a vertical line and a small flourish.

DINA ARUM AMBAR WATI
NIM. 20030016

ABSTRAK

Dina Arum Ambar Wati. 2023. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Program Studi: D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I : Ririh Sri Harjanti. Pembimbing II : Fitri Amaliyah.

Anggaran memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintah, karena sangat bergantung terhadap jumlah anggaran yang direalisasikan oleh pemerintah, sehingga diharapkan mampu memungkinkan pencapaian secara efektif dan efisien dari penyelenggara pemerintah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal periode 2018 – 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal periode 2018 – 2022 seluruhnya dikategorikan efektif. Untuk tingkat efisiensi penyerapan anggaran belanjanya rata-rata efisien hanya tahun 2022 kurang efisien. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran maka diperlukan koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Kata kunci: efektivitas, efisiensi, anggaran

ABSTRACT

Dina Arum Ambar Wati. 2023. Analysis of the Effectiveness and Efficiency of the Expenditure Budget at the Tegal Regency Population and Civil Registration Service. Study Program: D-III Accounting at Harapan Bersama Polytechnic. Advisor I : Ririh Sri Harjanti. Advisor II : Fitri Amaliyah.

The budget has a very important role in a government organization, because it is very dependent on the amount of the budget realized by the government, so that it is expected to be able to enable effective and efficient achievement of government administrators. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness and efficiency in absorbing the budget for the Tegal Regency Population and Civil Registration Office for the 2018-2022 period. The research method used is descriptive quantitative. Data collection methods used are observation, interviews, and literature study. The results of the study show that the level of effectiveness of budget absorption at the Tegal Regency Population and Civil Registration Office for the 2018-2022 period is all categorized as effective. For efficiency in absorption of the spending budget, the average efficiency is only in 2022, it will be less efficient. To improve effectiveness and efficiency, coordination and cooperation between interested parties is required.

Keywords: *effectiveness, efficiency, budget*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR (TA)	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktisi	6

1.5	Batasan Masalah.....	7
1.6	Kerangka Berpikir.....	7
1.7	Sistematika Penulisan	9
BAB II.....		11
TINJAUAN PUSTAKA		11
2.1	Akuntansi Sektor Publik	11
2.3	Pengertian Anggaran Sektor Publik.....	13
2.4	Fungsi Anggaran	13
2.5	Jenis-jenis Anggaran	15
2.6	Sumber Anggaran.....	16
2.7	Laporan Realisasi Anggaran	18
2.8	Belanja Daerah	19
2.9	Efektivitas	20
2.9.1	Kriteria Efektivitas.....	20
2.9.2	Faktor-Faktor Efektivitas.....	22
2.10	Efisiensi.....	22
2.10.1	Tujuan Efisiensi	23
2.11	Penelitian Terdahulu	24
BAB III		28
METODE PENELITIAN.....		28
3.1	Lokasi Penelitian.....	28
3.2	Waktu Penelitian	28
3.3	Jenis Data	28

3.4	Sumber Data.....	29
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	29
3.6	Metode Analisis Data.....	30
BAB IV		33
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		33
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	33
4.2	Hasil Analisis	34
4.2.1	Rasio Efektivitas Anggaran Belanja	34
4.2.2	Rasio Efisiensi Anggaran Belanja	37
4.3	Pembahasan.....	39
4.3.1	Analisis Efektivitas Anggaran Belanja	39
4.3.2	Analisis Efisiensi Anggaran Belanja	42
BAB V.....		46
KESIMPULAN DAN SARAN.....		46
5.1	Kesimpulan	46
5.2	Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA		48
LAMPIRAN.....		50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Disdukcapil Kab Tegal 2018-2021	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Kriteria Rasio Efektivitas.....	31
Tabel 3.2 Kriteria Rasio Efisiensi	32
Tabel 4.1 Hasil Analisis Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja	36
Tabel 4.2 Hasil Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	8
------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara	50
Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu Negara akan lebih maju dan berkembang melalui pembangunan nasional secara terus menerus dan berkesenambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bagian yang terpenting dari pembangunan nasional yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses di mana pendapatan total dan pendapatan perkapita meningkat, dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, dan yang menyiratkan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi perekonomian yang tercermin dari peningkatan pendapatan nasional. Pembangunan nasional yang dilakukan oleh negara memerlukan anggaran pada setiap periodenya. Seiring dengan peningkatan pembangunan nasional, maka anggaran yang dibutuhkan juga meningkat.

Anggaran memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan, sebab sangat bergantung di jumlah anggaran yang direalisasikan atau diberikan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2018) *Budget* adalah pernyataan yang berkaitan dengan menggunakan estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode yang sudah ditentukan kemudian dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran bisa diartikan sebagai *managerial plan for*

action yang bermanfaat dalam memfasilitasi tercapainya tujuan dari suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah atau sektor publik. Ada beberapa hal yang harus tercakup dalam anggaran pemerintah, yaitu *public accountability*, *planning* dan *controlling*.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah Bab II “anggaran pendapatan dan belanja daerah” pada ketentuan umum menjelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri empat elemen. (a) belanja operasi, (b) belanja modal, (c) belanja tidak terduga serta (d) belanja transfer. Belanja operasi ialah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga ialah pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) buat keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dan belanja transfer ialah pengeluaran uang berasal dari Pemerintah Daerah kepada Pemda lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Berdasarkan Mardiasmo (2018) Efektivitas ialah hubungan yang membandingkan anggaran yang ditargetkan dengan sasaran anggaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini konsep efektivitas menitikberatkan pada dampak (*outcome*) yang dihasilkan dari keluaran (*output*). Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan

yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan *output* (keluaran) yang diinginkan, berarti jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, waktu, biaya dan kualitas dapat dikatakan efektif.

Efisiensi ialah perbandingan terbaik antara *input* (masukan) serta *output* (keluaran). Menurut Mardiasmo (2018) efisiensi merupakan hubungan erat produktivitas yang mampu menunjukkan kehematan dari segi tenaga, waktu dan biaya. Konsep efisiensi ini menekankan perbandingan pengeluaran *input* seminimal mungkin tapi dapat menghasilkan *output* semaksimal mungkin. Seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Dari penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari upaya efisiensi ialah untuk mencapai efisien optimal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tegal adalah salah satu instansi pemerintah yang menggunakan dana dari pemerintah dalam menjalankan programnya. Permasalahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal adalah terkait dengan realisasi anggaran belanja khususnya di tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun pandemi adanya wabah COVID 19 yang

melanda seluruh dunia, sehingga berimbas pada penurunan dana transfer dari pusat dan provinsi ke daerah yang cukup besar.

Berikut ini adalah Data Realisasi Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal periode tahun 2018-2022.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Periode 2018-2022

Periode	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2018	12.179.550.438	11.529.725.989	649.824.449
2019	12.679.779.000	12.029.572.848	650.206.152
2020	13.864.264.000	13.246.451.032	617.812.968
2021	11.906.928.000	11.108.514.980	798.413.020
2022	10.602.258.500	9.767.570.583	834.687.917

Sumber: DISDUKCAPIL Kab. Tegal (2023)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2022 Anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal masih mengalami ketidaksesuaian antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang sudah ditetapkan, hal ini disebabkan ada beberapa program kegiatan yang dianggarkan tetapi tidak direalisasikan atau dilaksanakan. Dalam pembiayaan anggaran belanja terjadi selisih tertinggi yakni pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 834.687.917 kemudian yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 617.812.968. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun yaitu pada tahun 2018 – 2022 masih

mengalami ketidaksesuaian antara target dan realisasi belanja, sehingga menyebabkan adanya beberapa kegiatan yang anggarannya dihapuskan. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan suatu organisasi, untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.

Dengan adanya fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku kuliah.

1.4.2 Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada suatu lembaga/instansi pemerintah, serta diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya dalam penyusunan anggaran belanja.

b. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal

Memberikan gambaran bagi instansi mengenai analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

c. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya serta menambah wawasan dan pengetahuan.

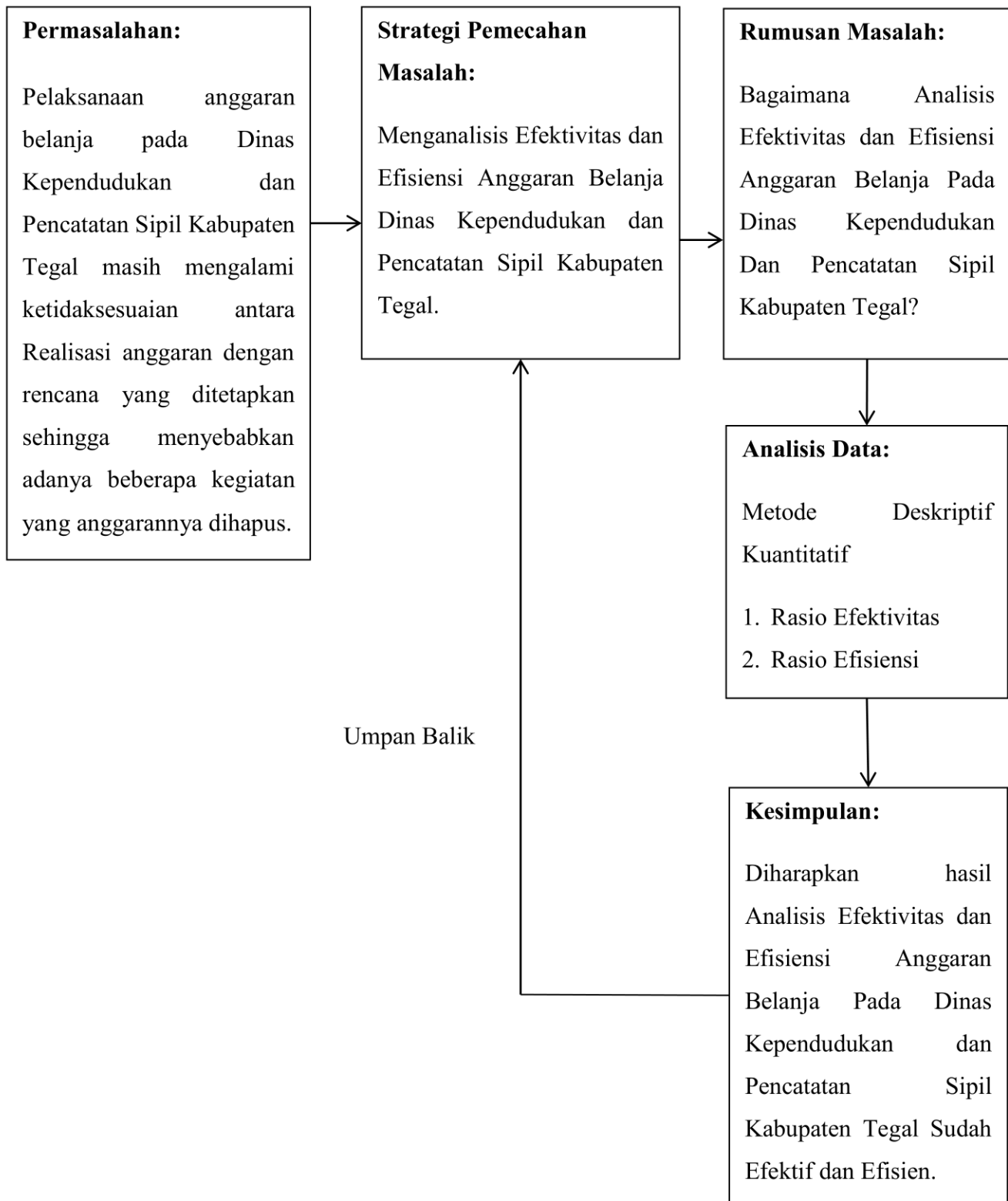
1.5 Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini adalah hanya terkait Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal selama periode 2018 sampai dengan tahun 2022.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah alur yang menggambarkan proses penelitian secara keseluruhan. Kerangka berfikir pada penelitian ini merupakan alur yang menggambarkan proses penelitian Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada periode 2018-2022. Dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilakukannya penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal yang berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian Isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan pengertian akuntansi sektor publik, standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan sektor publik, anggaran, fungsi anggaran, jenis-jenis

anggaran, sumber anggaran, belanja daerah, efektivitas, kriteria efektivitas, faktor-faktor efektivitas, efisiensi dan tujuan efisiensi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis data, sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian bagian akhir.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisikan tentang garis besar dari inti hasil penelitian dan saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisikan informasi tambahan guna mendukung kelengkapan laporan, antara lain Laporan keuangan, kartu konsultasi serta data-data yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi ialah suatu proses yang berawal dari pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran atas kejadian ekonomi dan transaksi *financial* serta berakhir pada penyajian laporan keuangan. Dalam ranah akuntansi sektor publik, akuntansi ialah suatu proses bermula dari identifikasi, melakukan pencatatan, mengukur, pengklasifikasian, mengikhtisar dan berakhir pada penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan instansi pemerintah sangat dibutuhkan bagi pihak-pihak eksternal misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat. Pihak eksternal memerlukan laporan keuangan instansi pemerintah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah atau digunakan sebagai bahan penelitian.

Menurut Mardiasmo (2018) Akuntansi Sektor Publik ialah alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas serta pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Berdasarkan pengertian di atas akuntansi sektor publik merupakan suatu alat penyedia informasi bagi publik terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan. Tujuan dari akuntansi sektor publik untuk memberi informasi yang dibutuhkan guna pengelolaan secara

cepat, ekonomis dan efisien atas alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi.

2.2 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), tahun 2010 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebelumnya diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2010 perubahan ini sangat nyata mengingat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebelumnya adalah diwajibkan penggunaan akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sangat bermanfaat bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak diluar organisasi. Standar Akuntansi sebagai acuan yang ditunjukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang memiliki otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum untuk penyajian laporan keuangan. Akuntansi Pemerintah menghasilkan informasi bagi pihak *intern* serta *ekstern*, sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen serta akuntansi keuangan.

2.3 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Menurut Berlian (2017) Mengatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan alat bagi pemerintah untuk menunjukan pembangunan sosial, ekonomi, meningkat kualitas hidup masyarakat dan menjamin kesinambungan. Anggaran diperlukan sebab terdapat keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tidak sedikit dan terus berkembang padahal sumber daya tersedia sangat terbatas.

Anggaran salah satu dokumen yang sangat penting bagi seluruh instansi pemerintah maupun instansi swasta, karena anggaran dipergunakan sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Anggaran memuat banyak komponen mulai dari *expense*, *revenue* serta *financing* yang dilakukan oleh instansi. Anggaran mempunyai peran penting bagi *government* serta jajarannya sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

2.4 Fungsi Anggaran

Menurut Nordiawan (2011) mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Alat Perencanaan

Dengan anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

2. Alat Pengendalian

Anggaran sebagai instrumen pengendalian untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*missappropriation*), serta penggunaan yang tidak semestinya.

3. Alat Kebijakan Fiskal

Arah saat kebijakan tertentu dapat ditentukan melalui anggaran sektor publik. Contohnya apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, apakah melakukan kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan.

4. Alat Politik

Pada organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.

5. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

6. Alat Penilaian Kinerja

Anggaran ialah suatu ukuran yang menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7. Alat Motivasi

Anggaran dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik bila memenuhi sifat “menantang, tetapi masih mungkin tercapai”

2.5 Jenis-jenis Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018) juga mengatakan bahwa anggaran sektor publik diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Anggaran Operasi

Anggaran ini dipergunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dikategorikan dalam anggaran operasi ialah belanja rutin. Belanja rutin merupakan pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Dianggap rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang pada setiap tahunnya.

2. Anggaran Modal

Anggaran ini memberikan rencana jangka panjang serta pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung lebih

dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

2.6 Sumber Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ialah satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah dan
3. Pembiayaan daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua hak wilayah/daerah yang diakui menjadi penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan wilayah/daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendapatan Transfer.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Mengacu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah.

Pajak Daerah dirinci berdasarkan objek, rincian objek serta sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci sesuai objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah yang sah ialah pendapatan/penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.7 Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ialah salah satu komponen laporan keuangan pokok pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk satu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing perbandingan dengan anggarannya. Informasi tersebut bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi akuntabilitas serta ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang.

2.8 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk pembelian barang/jasa untuk sehari-hari yang manfaatnya jangka pendek.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

2.9 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila keluaran yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

Sedangkan menurut Anggriani (2015) efektivitas adalah suatu kejadian yang memperlihatkan sejauh mana rencana mampu tercapai. Semakin banyak program yang dicapai, maka semakin efektif aktivitas tersebut. Sehingga efektivitas bisa juga diartikan sebagai tingkat keefektivan yang dapat dicapai dari suatu usaha atau cara tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

2.9.1 Kriteria Efektivitas

Suatu kegiatan bisa dikatakan efektif jika sudah memenuhi kriteria tertentu. Efektivitas berkaitan erat pada pelaksanaan semua tugas utama, pencapaian tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi dari

pelaksana tugas. Secara umum ada beberapa tolak ukur kriteria efektivitas sebagai berikut:

1. Efektivitas keseluruhan, sejauh mana organisasi melaksanakan semua tugas pokoknya.
2. Produktivitas, layanan utama dalam suatu organisasi.
3. Efisiensi, keberhasilan suatu kegiatan/program untuk emncapai sesuatu yang diharapkan.
4. Pertumbuhan, perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan sebelumnya.
5. Stabilitas, pemeliharaan struktur, fungsi serta sumber daya dimasa sulit.
6. Semangat kerja, kecenderungan seseorang berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan organisasi.
7. Kepuasan kerja, timbal balik dari usaha seseorang dalam perannya di organisasi.
8. Keterpaduan, komunikasi serta kerjasama yang baik dalam organisasi.
9. Fleksibel, mampuan individu dalam beradaptasi terhadap perubahan.
10. Penilaian pihak luar, penilaian disuatu lingkungan yang bekerjasama dengan individu atau organisasi.

2.9.2 Faktor-Faktor Efektivitas

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang jelas.
2. Adanya struktur organisasi.
3. Adanya dukungan atau partisipasi dari masyarakat.
4. Adanya sistem nilai yang dianut.

Suatu organisasi akan berjalan atau terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Suatu tujuan diharapkan dapat memberi motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan efektivitas.

2.10 Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018) efisiensi memiliki hubungan erat dengan konsep produktivitas. Untuk mengukur efisiensi dapat dengan membandingkan antara keluaran yang dihasilkan terhadap masukan yang digunakan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika hasil kerja tersebut dapat dicapai menggunakan sumber daya dan dana yang rendah. Efisiensi anggaran sangatlah

penting bagi pemerintah daerah dan jajarannya. Dengan adanya pengukuran efisiensi suatu instansi dapat menilai apakah suatu program telah tercapai dengan pendanaan yang serendah-rendahnya. Dalam instansi pemerintahan, efisiensi ini digunakan untuk mempertimbangkan besaran anggaran ditahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran di tahun sebelumnya tidak efisien maka bisa saja anggaran ditahun berikutnya akan dikurangi.

Sedangkan Menurut Mahmudi (2019) Efisiensi ialah perbandingan antara keluaran dengan masukan atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Semakin tinggi keluaran dibanding masukan, maka semakin besar tingkat efisiensi suatu lembaga/organisasi.

2.10.1 Tujuan Efisiensi

Tujuan efisiensi secara umum adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penggunaan sumber daya serta meminimalisir sumber daya terbuang sia-sia
2. Menaikan atau memaksimalkan kinerja untuk memperoleh hasil maksimal.
3. Mencapai target yang direncanakan.
4. Menerima keuntungan yang maksimal.

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa tujuan dari berbagai upaya efisiensi adalah untuk mencapai efisien optimal. Efisiensi optimal adalah suatu perbandingan terbaik antara pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan.

2.11 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wahyu Heri Prasetyo, Agustina Prativi Nugraheni (2020)	Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Deskriptif Kuantitatif	Penelitian menunjukan bahwa penyerapan anggaran Disdukcapil kota magelang Selama periode 2015-2018 hanya 2018 dan 2019 yang penyerapan anggarannya efektif. penyerapan anggaran ditahun 2015-2016 masuk kategori cukup efektif dengan presentase masing-masing 89,96% dan 88,97%.

(Disdukcapil)					
Kota					
Magelang.					
2.	Muhamma d Jakarsih, Dr. Titin Ruliana, Ida Rachmaw ati (2022)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.	Deskriptif Kuantitatif	Hasil menunjukkan presentase efektivitas efektif. Ditahun 2019 presentasinya mengalami peningkatan dikatakan Ditahun 2020 presentasinya menurun katagori cukup efektif.	Analisis bahwa tingkat cukup Ditahun 2019 presentasinya menurun dengan katagori cukup efektif.
3.	Hidaaatul Mustafiida h (2018)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil	Deskriptif Kuantitatif	Hasil menunjukkan tingkat pada tahun 2013 dan 2017 dikatakan efektif. Lalu ditahun 2014- 2016 dikatakan cukup efektif.	penelitian bahwa efektivitas Ditahun 2013 dan 2017 dikatakan efektif. Lalu ditahun 2014- 2016 dikatakan cukup efektif.

Kabupaen Jepara.					
4.	Alda Amelinda, Monang Situmoran g, Ellyn Octavianty (2022)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Depok.	Deskriptif Kualitatif	Hasil menunjukkan jumlah belanja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok pada tahun 2015-2019 setiap tahunnya mengalami fluktuasi atau perubahan naik turunnya anggaran belanja, hasilnya menunjukkan kategori tidak efektif dan efisien.	Penelitian bahwa anggaran Dinas Umum dan Kota tahun setiap mengalami atau naik anggaran hasilnya kategori dan efisien.
5.	Khamdani Hadi Sucipto, Yeni Priatna Sari, Mulyadi (2015)	Analisis Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan Dan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil menunjukkan pada tahun 2011 Dinas Disdukcapil Kab. Brebes dapat disimpulkan efisien dalam menggunakan anggaran belanjanya. Terlihat dari rasio	Penelitian bahwa Dinas Kab. dapat efisien menggunakan belanjanya. rasio

Pencatatan Kab. Brebes	efisiensi belanja tidak langsung 95% yang efisien dan didukung belanja tidak langsung yang mana efisien dalam menggunakan anggaran belanja.
---------------------------	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 9A Karangjongkeh, Pakembaran, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52415.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan Terhitung dari Januari sampai dengan Mei 2023

3.3 Jenis Data

Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif

Menurut (Sugiyono, 2012) Data kualitatif ialah data berbentuk kalimat, kata atau gambar. Data ini umumnya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data Kualitatif yang digunakan di penelitian ini ialah hasil wawancara tentang Laporan Realisasi Anggaran Belanja, analisis dokumen dan observasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

2. Data Kuantitatif

Menurut (Sugiyono, 2012) Data Kuantitatif ialah suatu data dimana dinyatakan dalam bentuk angka. Data Kuantitatif yang digunakan pada

penelitian ini seperti data keuangan berupa data Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada Disdukcapil Kab. Tegal.

3.4 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono 2012) Data Primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini seperti wawancara tentang kendala yang menyebabkan anggaran tidak terealisasi sepenuhnya pada staf bagian keuangan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono 2012) Data Sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder berupa data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2017-2022 serta jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk menerima data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2012) ialah teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan kepala sub bagian keuangan dan kepala sub bagian kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka menurut Sugiyono (2012) merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) metode analisis diskriptif kuantitatif merupakan analisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini analisis dengan cara menelaah serta mengkaji ulang data mengenai efektivitas dan

efisiensi dari pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yaitu:

1. Rasio Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019) Rasio Efektivitas merupakan hubungan antara realisasi anggaran belanja dengan rencana anggaran belanja. Semakin tinggi rasio efektivitasnya maka semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitasnya maka semakin buruk. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Rencana Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Sumber: Mahmudi (2019)

Rasio Efektivitas menandakan kemampuan pemerintah dalam memobilisasikan penerimaan anggaran yang ditargetkan. Secara umum nilai efektivitas anggaran dapat dikategorikan seperti berikut ini:

Tabel 3.1 Kriteria Rasio Efektivitas

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

2. Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019) Rasio efisiensi merupakan rasio yang membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja yang digunakan untuk menghitung tingkat penghemat anggaran yang telah dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat *absolut* tetapi *relatife*. Artinya ada standar yang dianggap baik untuk rasio ini.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Sumber: Mahmudi (2019)

Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik. Secara umum nilai rasio efisiensi anggaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Rasio Efisiensi

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Dibawah dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2019)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah kota Tegal dalam bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah dan pembangunan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan perundang-undangan tersebut dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, salah satunya pembentukan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terkait dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, untuk tahun yang berakhir 2018 anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 12.179.550.438 dengan realisasi anggaran yang terpakai sebesar Rp. 11.529.725.989. Kemudian pada tahun 2019 menargetkan anggaran sebesar Rp. 12.679.779.000 dan realisasi sebesar Rp. 12.029.572.848. Kemudian untuk tahun

2020 menargetkan anggaran sebesar Rp. 13.864.264.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.264.451.032. Tahun anggaran 2021 menargetkan anggaran sebesar Rp. 11.906.928.000 dan realisasi sebesar Rp. 11.108.514.980. Pada tahun 2022 menargetkan anggaran sebesar Rp. 10.602.258.500 dan realisasi yang terpakai sebesar Rp. 9.767.570.583. Untuk mengetahui anggaran belanjanya sudah efektif dan efisien maka diperlukan perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

4.2 Hasil Analisis

4.2.1 Rasio Efektivitas Anggaran Belanja

Tingkat Rasio Efektivitas Belanja diukur menggunakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target/sasaran anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada periode yang diambil tahun 2018 sampai dengan 2022.

Berikut perhitungan rasio efektivitas belanja pada Disdukcapil Kab. Tegal pada tahun 2018 sampai tahun 2022:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas tahun 2018} &= \frac{\text{Rp. 11.529.775.989}}{\text{Rp. 12.179.550.438}} \times 100 \% \\ &= 94,66\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas tahun 2019} &= \frac{\text{Rp. 12.029.572.848}}{\text{Rp. 12.679.779.000}} \times 100 \% \\ &= 94,87\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas tahun 2020} &= \frac{\text{Rp. 13.264.451.032}}{\text{Rp. 13.864.264.000}} \times 100 \% \\ &= 95,67\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas tahun 2021} &= \frac{\text{Rp. 11.108.514.980}}{\text{Rp. 11.906.928.000}} \times 100 \% \\ &= 93,29\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas tahun 2022} &= \frac{\text{Rp. 9.767.570.583}}{\text{Rp. 10.602.258.500}} \times 100 \% \\ &= 92,12\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Belanja diatas, maka dapat diketahui gambaran tingkat efektivitasnya anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tahun 2018 – 2022 yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Periode	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
	Anggaran (Rp)	Anggaran(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)=(3):(2)	(5)
2018	12.179.550.438	11.529.725.989	94,66	Efektif
2019	12.679.779.000	12.029.572.848	94,87	Efektif
2020	13.864.264.000	13.246.451.032	95,67	Efektif
2021	11.906.928.000	11.108.514.980	93,29	Efektif
2022	10.602.258.500	9.767.570.583	92,12	Efektif

Sumber: Data diolah, 2023

Dalam table 4.1 dapat dilihat bahwa perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja pada Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, terlihat pada tahun 2018 tingkat efektivitas anggaran belanja sebesar 94,66% sehingga termasuk kriteria Efektif. Selanjutnya pada tahun 2019 tingkat efektivitas anggaran belanjanya sebesar 94,87% sehingga termasuk kriteria Efektif. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas anggaran belanjanya sebesar 95,67% sehingga termasuk kriteria Efektif. Pada tahun 2021 tingkat efektivitas anggarannya sebesar 93,29% sehingga termasuk dalam kriteria Efektif. Dan pada tahun 2022 untuk tingkat efektivitas anggarannya sebesar 92,12% sehingga termasuk dalam kategori Efektif.

4.2.2 Rasio Efisiensi Anggaran Belanja

Tingkat rasio efisiensi anggaran belanja diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada periode yang diambil tahun 2018 sampai dengan 2022. Angka yang dihasilkan dari rasio ini tidak bersifat *absolut*, tetapi *relative* yang artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Jika rasio efisiensinya kurang dari 100% maka pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggarannya, begitu juga sebaliknya jika lebih dari 100% maka mengidentifikasikan bahwa terjadi pemborosan anggaran.

Berikut perhitungan Rasio Efisiensi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2018 - 2022:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi tahun 2018} &= \frac{\text{Rp. 6.495.801.000}}{\text{Rp. 11.529.725.989}} \times 100 \% \\ &= 56,33\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi tahun 2019} &= \frac{\text{Rp. 6.904.614.000}}{\text{Rp. 12.029.572.848}} \times 100 \% \\ &= 57,39\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi tahun 2020} &= \frac{\text{Rp. 8.317.490.000}}{\text{Rp. 13.264.451.032}} \times 100 \% \\
 &= 62,79\% \\
 \text{Efisiensi tahun 2021} &= \frac{\text{Rp. 6.495.185.590}}{\text{Rp. 11.108.514.980}} \times 100 \% \\
 &= 58,47\% \\
 \text{Efisiensi tahun 2022} &= \frac{\text{Rp. 9.665.089.500}}{\text{Rp. 9.767.270.583}} \times 100 \% \\
 &= 98,85\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi anggaran belanja diatas, maka dapat diketahui gambaran tingkat efisiensi anggaran belana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 4.2 Hasil Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Periode	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)	(5)
2018	6.495.801.000	11.529.725.989	56,33	Sangat Efisien
2019	6.904.614.000	12.029.572.848	57,39	Sangat Efisien
2020	8.317.490.000	13.246.451.032	62,79	Efisien
2021	6.495.185.590	11.108.514.980	58,47	Sangat Efisien
2022	9.665.089.500	9.767.570.583	98,85	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan table 4.2 dapat dilihat bahwa perhitungan tingkat efesiensi anggaran belanja pada Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, terlihat pada tahun 2018 tingkat efisiensi anggaran belanja sebesar 56,33% sehingga termasuk kriteria Tidak Efektif. Selanjutnya pada tahun 2019 tingkat efisiensi anggaran belanjanya sebesar 57,39% sehingga termasuk kriteria Tidak Efektif. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi anggaran belanjanya sebesar 62,79% sehingga termasuk kriteria Tidak Efektif. Pada tahun 2021 tingkat efisiensi anggarannya sebesar 58,47% sehingga termasuk dalam kriteria Tidak Efisien. Dan pada tahun 2022 tingkat efisiensi anggarannya sebesar 98,85% sehingga termasuk kedalam kategori Kurang Efisien.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2018 sampai dengan 2022 secara keseluruhan dikategorikan efektif. Hal itu terjadi karena hal-hal berikut:

- a. Tahun 2018 tingkat rasio efektivitas anggaran belanja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal sebesar 94,66% yang termasuk dalam kategori efektif, dikarenakan anggaran yang ditentukan sudah banyak yang terserap dan hanya beberapa yang

belum terserap. Masing-masing anggaran belanja sudah hampir merealisasikan anggaran belanjanya, hanya saja pada kegiatan belanja barang dan jasa lebih banyak sisa anggaran belanjanya dari pada belanja modal dan belanja pegawai yakni sebesar Rp. 485.004.401 hal ini bisa terjadi disebabkan pada saat perencanaan anggaran standar biaya pembelian barang yang dibuat lebih besar dari tahun saat realisasi anggaran tersebut. Misalnya pada belanja jasa kantor dan bahan habis pakai ataupun belanja makanan dan minuman tersebut memiliki sisa anggaran karena selisih harga sesungguhnya tidak sesuai yang telah dianggarkan, atau adanya kenaikan harga ataupun penurunan harga yang di pasar mengakibatkan adanya ketidaksesuaian.

- b. Tahun 2019 tingkat rasio efektivitasnya sebesar 94,87% yang masuk dalam kateogore efektif, anggaran pada kegiatan belanja pegawai memiliki selisih lebih pembiayaan sebesar Rp. 269.002.742 kemudian belanja barang dan jasa mempunyai sisa Rp. 351.453.910 dan pada belanja modal sebesar Rp. 29.749.500, dikarenakan realisasi anggaran yang masih cukup jauh dalam mencapai target yang ditentukan. Sisa lebih yang lebih banyak yaitu pada belanja pegawai, barang dan jasa, misalnya pada belanja perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, pemberian uang sakunya lebih atau tersisa, hal ini bisa terjadi karena pada saat

pembuatan rencana anggaran pegawai bendahara tidak mengetahui pasti berapa orang/staf/pegawai yang akan ikut.

- c. Tahun 2020 tingkat efektivitas Anggaran Belanja pada total realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 13.246.451.032 dan target anggaran belanja sebesar Rp. 13.864.264.000 dengan tingkat efektivitas sebesar 95,67% maka tingkat efektivitasnya masuk dalam kriteria efektif, dikarenakan anggaran yang ditentukan sudah banyak yang terserap dan hanya beberapa yang belum terserap. Masing-masing belanja sudah hampir merealisasikan anggaran belanjanya, hanya saja pada anggaran kegiatan belanja barang dan jasa lebih banyak sisa anggarannya dari pada belanja modal dan belanja pegawai.
- d. Tahun 2021 tingkat efektivitas anggaran belanja sebesar 93,29% dilihat pada laporan realisasi anggaran belanja di total realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 11.108.514.980 dan target anggaran belanja sebesar Rp. 11.906.928.000. Sehingga diperoleh selisih anggaran pada akhir tahun sebesar Rp. 617.812.968, maka tingkat efektivitasnya masuk dalam kriteria efektif. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga pada kegiatan belanja modal dan belanja mesin yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan pengeluaran bertambah dan presentase efektivitasnya juga meningkat.
- e. Tahun 2022 tingkat efektivitas anggaran belanjanya sebesar 92,12%, dimana masuk kedalam kategori efektif. Masing-masing

anggaran belanja sudah hampir merealisasikan anggaran belanjanya, hanya saja pada kegiatan belanja barang dan jasa lebih banyak sisa anggaran belanjanya dari pada belanja modal dan belanja pegawai yakni sebesar Rp. 536.942.407 hal ini bisa terjadi disebabkan pada saat perencanaan anggaran standar biaya pembelian barang yang dibuat lebih besar dari tahun saat realisasi anggaran tersebut. Misalnya pada belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adanya kenaikan harga ataupun penurunan harga yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian.

Berdasarkan tabel 4.1 terkait dengan perhitungan efektivitas, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal periode 2018 - 2022 menunjukkan hasil efektif dimana sudah baik dalam penggunaan dana. Akan tetapi diperlukan juga koordinasi serta kerja sama antar pegawai di setiap bidang maupun antar pihak pengambil kebijakan dengan melaksanakan kebijakan, sebab koordinasi sangat dibutuhkan dalam suatu perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan.

4.3.2 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja

Berdasarkan Analisis perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal tahun 2018

sampai dengan 2022 keseluruhan dikategorikan tidak efisien. Hal ini terjadi karena hal-hal berikut:

- a. Tahun 2018 berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efisiensi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 6.495.801.000 dengan Rp. 11.529.725.989 dan memperoleh hasil sebesar 56,33% sehingga masuk ke dalam kriteria sangat efisien, hasil presentase tingkat efisiensi menggambarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mampu mengelola dana dalam menjalankan program yang telah direncanakan.
- b. Tahun 2019 berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 6.904.614.000 dengan Rp. 12.029.572.848 memperoleh hasil sebesar 57,39% sehingga masuk ke dalam kriteria sangat efisien. Hanya saja pada kegiatan anggaran belanja peralatan dan mesin mengalami kenaikan harga daripada tahun sebelumnya.
- c. Tahun 2020 berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.317.490.000 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 13.246.451.032 memperoleh hasil sebesar 62,79% sehingga masuk ke dalam kriteria efisien, hal ini

menggambarkan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mampu mengelola dana seefisien mungkin dalam menjalankan program yang direncanakan.

- d. Tahun 2021 berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.495.185.590 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 11.108.514.980 memperoleh hasil sebesar 58,47% sehingga masuk ke dalam kriteria sangat efisien. Hanya saja adanya kenaikan harga pada belanja peralatan dan mesin, sehingga menyebabkan angka *output* tinggi.
- e. Tahun 2022 berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 9.665.089.500 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 9.767.570.583 memperoleh hasil sebesar 98,85% sehingga masuk ke dalam kriteria kurang efisien, hal ini menandakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mampu mengelola keuangan dengan baik dan cermat, hanya saja ada kenaikan pada belanja pegawai dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel 4.2 terkait dengan perhitungan efisiensi, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal periode 2018 -2022 menunjukkan efisien, hal ini menunjukkan bahwa Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dinilai sangat baik dan bisa menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan rasio efektivitas anggaran belanja menunjukkan kinerja dalam merealisasikan anggaran belanja masih tergolong efektif karena anggaran yang ditetapkan atau rasio efektivitasnya berada dipersentase 90-100% yang diartikan mampu mencapai anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Dan berdasarkan perhitungan Rasio Efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal periode 2018 sampai 2021 menunjukkan hasil rata-rata efisien, sedangkan tahun 2022 menunjukkan hasil kurang efisien, dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sudah menghemat dalam mengalokasikan anggaran belanja, hanya saja pada tahun 2022 anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang disampaikan adalah:

1. Bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal

Anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tahun 2022 kriteria efisiensinya kurang efisien, maka agar anggaran belanja yang dikeluarkan dapat efisien, ada baiknya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam hal ini, perlu memotong anggaran yang kurang produktif dan mengalihkan kesektor yang produktif.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bisa menambah tahun anggaran yang akan diteliti dan mampu melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan diharapkan untuk lebih banyak sumber untuk mencari laporan keuangan dan data keuangan perusahaan/instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelinda, A., Situmorang, M., Octavianty, E., & Pakuan, U. (2020). *Analisis efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota depok.*
- Fatmala, E. (2020). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara).*
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010.*
- Indonesia, R. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.*
- Jarkasih, M., Ruliana, T., & Rachmawati, I. (2020). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.*
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018.*
- Mustafiidah, H. (2018). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.*
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor publik.*
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). *Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019.*
- Republik, I. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Sucipto, K. H., & Sari, M. Y. P. (2015). *Analisis Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Brebes.*
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian.* Jakarta Alfa beta , 2012.
- Sumenge, A. S., Efektivitas, A., Efektifitas, A., Efisiensi, D. A. N., Anggaran, P., & Sumenge, A. S. (2012). *value for money.*

- Anggriani, S. D. (2015). *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*.
<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-danlandasan.html>.
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010*.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.
https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Pelayanan_Publik/ilssEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*.
<https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=9011>
- Nordiawan, D. (2008). *Akuntansi Sektor publik*.
<https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=9109>
- Republik, I. (2020). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2020*.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian*. Jakarta Alfa beta , 2012.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

Berikut ini adalah daftar pertanyaan Antara pihak peneliti dan pihak internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Narasumber : Ika Pratiwi, SE

Jabatan : Kasubag Keuangan

1. Kendala apa saja yang menyebabkan anggaran belanja tidak terealisasi sepenuhnya?

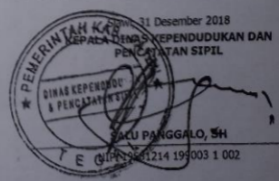
Secara Umum penyebab utama anggaran tidak terealisasi sepenuhnya karena adanya pandemic Covid 19 pada tahun 2020-2022 yang melanda seluruh dunia yang tentunya juga berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dan jalannya pemerintah, anggaran yang telah dianggarkan mengalami refocusing/perhitungan kembali dan ada beberapa kegiatan yang dihapus anggarannya untuk menangani pandemic sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian anggaran.

Dan adanya sisa kontrak dari penyusunan barang jasa, seperti halnya pada belanja barang dan jasa memiliki sisa yang lebih banyak atau saat penyusunan rencana adanya perbedaan harga sesungguhnya tidak sesuai yang dianggarkan, atau adanya kenaikan harga atau penurunan harga yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian.

Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun 2018

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018 DAN 2017					
Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2.06 Unit Organisasi : 2.06.01 Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
4	PENDAPATAN - LRA	665.000.000,00	871.390.000,00	131,04	888.842.882,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	665.000.000,00	871.390.000,00	131,04	888.842.882,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Seh - LRA	665.000.000,00	871.390.000,00	131,04	888.842.882,00
5	BELANJA	12.179.550.438,00	11.529.725.989,00	94,66	5.569.849.132,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.036.050.438,00	10.484.445.300,00	95,00	3.927.324.786,00
5.1.1	Belanja Pegawai	6.157.505.438,00	6.090.904.701,00	98,92	936.321.900,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.878.545.000,00	4.393.540.599,00	90,06	2.991.002.886,00
5.2	BELANJA MODAL	1.143.500.000,00	1.045.280.689,00	91,41	1.642.524.346,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	588.500.000,00	563.483.679,00	95,75	1.478.294.420,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	555.000.000,00	481.797.010,00	86,81	144.390.326,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	19.839.600,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.514.550.438,00)	(10.658.335.989,00)	92,56	(4.681.006.250,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.514.550.438,00)	(10.658.335.989,00)	92,56	(4.681.006.250,00)



Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018					
Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2.06 Unit Organisasi : 2.06.01 Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
4	PENDAPATAN - LRA	550.000.000,00	745.850.000,00	135,61	871.390.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	550.000.000,00	745.850.000,00	135,61	871.390.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	550.000.000,00	745.850.000,00	135,61	871.390.000,00
5	BELANJA	12.679.779.000,00	12.029.572.848,00	94,87	11.529.725.989,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.154.779.000,00	10.534.322.348,00	94,44	10.484.445.300,00
5.1.1	Belanja Pegawai	6.669.091.000,00	6.400.088.258,00	95,97	6.090.904.701,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.485.688.000,00	4.134.234.090,00	92,16	4.393.540.599,00
5.2	BELANJA MODAL	1.525.000.000,00	1.495.250.500,00	98,05	1.045.280.689,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.350.000.000,00	1.322.330.500,00	97,95	563.483.679,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	172.920.000,00	98,81	481.797.010,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.129.779.000,00)	(11.283.722.848,00)	93,02	(10.658.335.989,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.129.779.000,00)	(11.283.722.848,00)	93,02	(10.658.335.989,00)



Stawi, 1 Januari 2019
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. TEGAL
 S. RIYADI, S.Sos, M.Si
 NIP. 19720911 199203 1 001

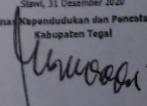
Halaman 1 dari 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun 2020

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019					
Urutan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2.06 Unit Organisasi : 2.06.01 Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01		Urutan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	0,00	671.985.000,00	0,00	745.850.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	0,00	671.985.000,00	0,00	745.850.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	671.985.000,00	0,00	745.850.000,00
5	BELANJA	12.864.264.000,00	12.284.481.032,00	95,67	12.029.572.848,00
5.1	BELANJA OPERASI	13.004.284.000,00	12.431.009.400,00	95,59	10.534.322.348,00
5.1.1	Belanja Pegawai	6.317.735.000,00	6.016.173.522,00	95,23	6.400.088.258,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.686.549.000,00	6.414.835.878,00	95,94	4.134.334.090,00
5.2	BELANJA MODAL	859.980.000,00	833.441.632,00	96,91	1.495.250.500,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	469.100.000,00	445.680.632,00	95,01	1.322.330.500,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.880.000,00	387.761.000,00	99,20	172.920.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.864.264.000,00)	(12.592.466.032,00)	90,83	(11.283.722.848,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA)	(12.864.264.000,00)	(12.592.466.032,00)	90,83	(11.283.722.848,00)

Stawi, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tegal



SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 197209111992031001

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020					
Urusan Pemerintahan : 2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Pemerintahan : 2.12		Administrasi Kependudukan dan Sipil			
Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Sub Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	671.985.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	671.985.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	671.985.000,00
5	BELANJA DAERAH	11.906.928.000,00	11.108.514.980,00	93,29	13.264.451.032,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.886.178.000,00	10.305.476.780,00	82,96	12.431.009.400,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.604.844.000,00	5.387.805.338,00	96,13	6.016.173.522,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.481.334.000,00	4.917.671.442,00	89,72	6.414.935.878,00
5.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	820.750.000,00	803.038.200,00	97,84	833.441.632,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	633.750.000,00	618.775.200,00	97,64	445.680.632,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187.000.000,00	184.263.000,00	98,54	387.761.000,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	11.906.928.000,00	11.108.514.980,00	93,29	13.264.451.032,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.906.928.000,00)	(11.108.514.980,00)	93,29	(12.592.466.032,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA)	(11.906.928.000,00)	(11.108.514.980,00)	93,29	(12.592.466.032,00)

Slawi, 31 Desember 2021

Pt. Kepala Dinas DUKCAPIL, Kab. Tegal
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

SUPRIYADI, S.Sos, MS.I

NIP. 197209111992031001

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun 2022

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021					
Utawa Pemeliharaan	2-12-ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL				
BKPD	2-12-0-00-0-01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Unit Organisasi	2-12-0-00-0-00-01-000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Sub Unit Organisasi	2-12-0-00-0-00-01-000-000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
3	BELANJA DAERAH	16.575.752.360,00	9.767.570.583,00	59,02	11.188.514.980,00
3.1	BELANJA OPERASI	9.964.088.420,00	5.876.509.743,00	59,08	10.205.076.000,00
3.1.01	Belanja Pegawai	5.526.000.000,00	5.153.958.670,00	93,26	5.287.805.000,00
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.438.088.420,00	3.692.147.393,00	83,21	4.917.271.000,00
3.2	BELANJA MODAL	665.168.000,00	654.494.820,00	98,55	983.078.000,00
3.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	665.168.000,00	654.494.820,00	98,55	978.774.000,00
3.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0	104.253.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(10.673.758.360,00)	(8.767.570.583,00)	8	(11.188.514.980,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(10.673.758.360,00)	(8.767.570.583,00)	8	(11.188.514.980,00)